

**EVALUASI TINGKAT PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN  
WILAYAH KECAMATAN SRAGI – KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN  
PEKALONGAN TAHUN 2001-2012**

**Fadhila Dian Maulida** ✉ **Rahma Hayati**

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

**Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*

Diterima April 2014

Disetujui April 2014

Dipublikasikan Juni 2014

*Keywords:*

*Public Service, Availability  
Evaluation, and Service  
Accessibility*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan membandingkan ketersediaan pelayanan dan daya layan fasilitas pelayanan publik di daerah otonom baru Kecamatan Siwalan dengan daerah induk Kecamatan Sragi serta mengkaji tingkat aksesibilitas masyarakat Sragi dan Siwalan terhadap fasilitas pelayanan publik pasca pemekaran kecamatan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan metode survai. Objek dalam penelitian ini yaitu ketersediaan pelayanan publik dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Teknik analisis data yang digunakan meliputi *Guttman Scalling Methods*, *A range of good and threshold* dari Christaller dan acuan pembanding SNI 03-1733-2004, rumus Gravitasi, serta aturan *Sturgess*. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesenjangan ketersediaan fasilitas, daya layan fasilitas, dan aksesibilitas terhadap pelayanan publik, dimana Kecamatan Sragi lebih baik dibandingkan dengan Kecamatan Siwalan.

**Abstract**

*The aim of this research was to compare the service availability and the service ability of public service facilities in the new autonomous area, Siwalan subdistrict, with the main area, Sragi subdistrict, and also to analyze accessibility index of Sragi and Siwalan society focusing on public service facilities after subdistrict expansion. The research approach was descriptive quantitative using survey methods. The object of this research was evaluation of public service availability and society accessibility index toward the facilities. The data analysis technique of this research using Guttman Scalling Methods, A range of good and threshold from Christaller, and reference of comparison SNI 03-1733-2004, Gravity Formula, also Sturgess rule. The research result indicated discrepancies between both of the subdistrict including service availability, service ability, and accessibility toward public service, where Sragi subdistrict is better than Siwalan Subdistrict.*

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C1 Lantai 1 FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: [geografiunnes@gmail.com](mailto:geografiunnes@gmail.com)

© 2014 Universitas Negeri Semarang

ISSN 2252-6285

## PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, dan hubungan yang serasi antara daerah dan pusat (PP No.129 Tahun 2000). Seiring dengan perkembangan yang ada pada saat ini, pemekaran wilayah dilakukan dengan maksud agar pemerintah daerah dapat lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan dari pemerintah dan melalui pemekaran wilayah diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan (Nuraini, 2011: 13).

Dalam realitanya banyak terjadi penyimpangan dan sebagai akibatnya tujuan dari kebijakan yang diterapkan tidak dapat tercapai. Berdasarkan hasil survai pemerintah dimana hampir lebih dari 70% Daerah Otonomi Baru (DOB) mengalami kegagalan dalam perkembangannya (Kompas, 2012). Hasil temuan tim evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dalam kasus kegagalan Daerah Otonom Baru (DOB) penyebabnya adalah persiapan yang kurang baik dan pembentukannya lebih didasarkan pada kepentingan elit daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih kepada kepentingan sendiri dan belanja birokrasi daripada untuk membangun infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat, akibatnya banyak DOB yang tidak berkembang karena menyimpang dari sasaran utama pemekaran (Investor Daily Indonesia, 2013).

Evaluasi ketersediaan pelayanan publik merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memahami, menganalisis dan memberikan penilaian terhadap perkembangan kinerja Daerah Otonom Baru (DOB) dan daerah induk utamanya dalam menyediakan fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat. Kecamatan Siwalan merupakan Daerah Otonom Hasil

Pemekaran (DOHP) yang terbentuk dari hasil pemekaran Kecamatan Sragi pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No.13 Tahun 2001. Latar belakang pemekaran wilayah yaitu luas geografis Kecamatan Sragi (daerah induk) yang meliputi 30 desa, sehingga terjadi kesulitan dalam melakukan koordinasi antardesa dan tidak terjangkaunya fasilitas publik secara merata akibat terpusat pada ibukota kecamatan. Pertimbangan lainnya yaitu letak daerah Siwalan yang berada di jalur pantura sehingga dinilai potensial untuk perkembangan DOHP pasca pemekaran (Hasil wawancara dengan Bapak Wahidin, mantan staf pemerintah Kecamatan Sragi).

Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan ketersediaan, daya layan fasilitas pelayanan publik, serta mengkaji tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas tersebut pasca pemekaran kecamatan di Kecamatan Sragi dan Siwalan

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survai. Metode survai merupakan penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah (Nazir, 1999: 56). Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer waktu tempuh dari masing-masing desa menuju ke ibukota kecamatan untuk analisis tingkat aksesibilitas wilayah diperoleh melalui wawancara. Data sekunder berupa Kecamatan Sragi Dalam Angka dan Kecamatan Siwalan Dalam Angka tahun 2006 dan 2012, data deskripsi wilayah, peta Kecamatan Sragi dan Siwalan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara (interview), dan pengumpulan data sekunder. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting fasilitas pelayanan

publik dan kondisi aksesibilitas kedua wilayah penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data waktu tempuh dan permasalahan pelayanan publik yang muncul pasca pemekaran. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder yang memanfaatkan data yang sudah tersedia di instansi. Data sekunder Kecamatan Dalam Angka nantinya digunakan untuk mengevaluasi ketersediaan dan daya layan fasilitas. Analisis tingkat aksesibilitas terhadap pelayanan publik dihitung dengan menggunakan rumus Gravitasi kemudian diklasifikasikan ke dalam orde menurut aturan Sturges.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Evaluasi Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Pasca Pemekaran

Evaluasi ketersediaan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan Guttman Scalling Methods, yakni metode untuk mengetahui ada tidaknya fasilitas pelayanan dengan menggunakan skor, skor 1 untuk fasilitas yang “Ada” (tersedia) dan skor 0 untuk fasilitas yang “Tidak Ada” (tidak tersedia). Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, seluruh nilai Kr dan Ks berada diatas ambang batas, sehingga data tersebut dapat diterima dan cukup baik untuk digunakan dalam survai. Hasil perhitungan di Kecamatan Sragi akan ditampilkan dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 : Hasil Evaluasi Ketersediaan Pelayanan Publik Kecamatan Sragi Tahun 2012

No	Fasilitas	Tahun							
		2006				2012			
		Kr	Ket.	Ks	Ket.	Kr	Ket.	Ks	Ket.
1	Pendidikan	0,96	diterima	0,84	diterima	0,96	diterima	0,79	diterima
2	Kesehatan	0,96	diterima	0,88	diterima	0,96	diterima	0,83	diterima
3	Peribadatan	0,96	diterima	0,82	diterima	0,96	diterima	0,82	diterima
4	Ekonomi	0,95	diterima	0,85	diterima	0,95	diterima	0,86	diterima

Sumber: Analisis Data Kecamatan Sragi Dalam Angka 2012

Berikut merupakan hasil evaluasi ketersediaan Kecamatan Siwalan:

Tabel 3.2 : Hasil Evaluasi Ketersediaan Pelayanan Publik Kecamatan Siwalan Tahun 2012

No	Fasilitas	Tahun							
		2006				2012			
		Kr	Ket.	Ks	Ket.	Kr	Ket.	Ks	Ket.
1	Pendidikan	0,94	diterima	0,78	diterima	0,94	diterima	0,79	diterima
2	Kesehatan	0,95	diterima	0,87	diterima	0,93	diterima	0,78	diterima
3	Peribadatan	0,94	diterima	0,76	diterima	0,94	diterima	0,76	diterima
4	Ekonomi	0,94	diterima	0,81	diterima	0,94	diterima	0,82	diterima

Sumber: Analisis Data Kecamatan Siwalan Dalam Angka 2012, 2014

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh tingkat ketersediaan fasilitas pelayanan publik di Kecamatan Sragi lebih tinggi dibandingkan dengan Siwalan. Hingga satu dasawarsa pemekaran, masih belum tersedia fasilitas SMA dan pasar di Kecamatan Siwalan.

### 2. Evaluasi Fungsi Pelayanan (Daya Layan) Pasca Pemekaran

Fungsi pelayanan berkenaan dengan range and threshold dari masing-masing fasilitas pelayanan publik. Range disini merupakan

jangkauan/ jarak, yaitu jarak maksimal yang rela ditempuh untuk mendapatkan layanan yang ada. Threshold merupakan jumlah penduduk yang dapat dilayani oleh fasilitas pelayanan, biasanya menggunakan pengguna aktual atau potensial yang dibandingkan kembali dengan SNI 03-1733-2004 sebagai standar/ acuan daya layan ideal.

Berikut akan disajikan perbandingan pencapaian daya layan fasilitas pelayanan publik di Kecamatan Sragi dan Kecamatan Siwalan.

Tabel 3.3 : Perbandingan Pencapaian Daya Layan Fasilitas Pelayanan di Kecamatan Sragi dan Siwalan Tahun 2012.

No	Fasilitas	Pencapaian	
		Kecamatan Sragi	Kecamatan Siwalan
1	SD	Lebih	Lebih
2	SMP	Lebih	Lebih
3	SMA	Lebih	Kurang
4	Puskesmas	Lebih	Lebih
5	Puskesmas Pembantu	Lebih	Lebih
6	Posyandu	Lebih	Lebih
7	Masjid	Lebih	Lebih
8	Pasar	Lebih	Kurang
9	Toko/warung	Lebih	Lebih

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2014

Hasil yang diperoleh terdapat kesenjangan antara kedua wilayah. Di kecamatan induk daya layan seluruh fasilitas yang ada telah dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Sedangkan Kecamatan Siwalan sebagai daerah otonom baru ditemukan daya layan fasilitas yang masih kurang yaitu SMA dan Pasar.

### 3. Analisis Tingkat Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Wilayah

Analisis aksesibilitas menggunakan rumus Gravitasi diperoleh dengan menghitung data jarak tempuh, waktu tempuh, jumlah penduduk, dan ukuran daya tarik jumlah fasilitas pelayanan. Jarak tempuh dari masing-masing desa menuju ke ibukota Kecamatan diperoleh dari data Kecamatan Sragi dan Siwalan Dalam Angka Tahun 2012. Dibawah ini disajikan data tingkat aksesibilitas di Kecamatan Sragi dan Siwalan:

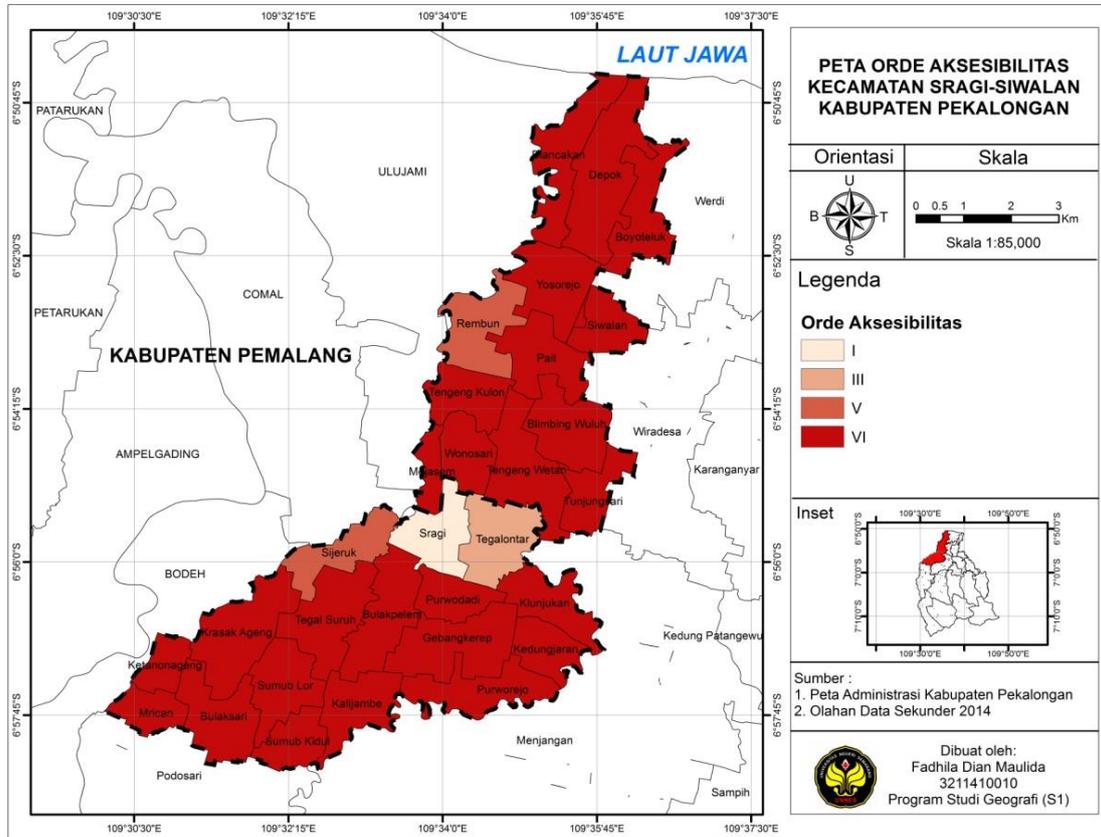
Tabel 3.4: Perbandingan Orde Tingkat Aksesibilitas Tiap Desa di Kecamatan Sragi dan Kecamatan Siwalan Tahun 2014

No	Nama Desa	Tij	Orde	No	Nama Desa	Tij	Orde
Kecamatan Sragi				16	Sragi	1,460,050,695	I
1	Ketanon Ageng	25,916,523	VI	17	Tegalontar	792,765,147	III
2	Mrican	14,848,188	VI	Kecamatan Siwalan			
3	Bulaksari	49,054,421	VI	18	Mejasem	45,427,609	VI
4	Sumub Lor	90,854,985	VI	19	Wonosari	62,664,429	VI
5	Sumub Kidul	72,757,854	VI	20	Tengeng Wetan	138,653,891	VI
6	Kalijambe	218,914,118	VI	21	Tunjungsari	9,308,709	VI
7	Purworejo	92,286,136	VI	22	Blimbingwuluh	28,764,812	VI
8	Kedungjaran	106,003,254	VI	23	Pait	162,691,004	VI
9	Klunjukan	167,133,009	VI	24	Tengeng Kulon	109,791,475	VI
10	Gebangkerep	183,908,634	VI	25	Rembun	271,428,925	V
11	Purwodadi	168,530,006	VI	26	Yosorejo	151,711,857	VI
12	Bulakpelem	242,701,227	VI	27	Siwalan	208,881,054	VI
13	Tegalsuruh	183,129,580	VI	28	Boyoteluk	35,030,689	VI
14	Krasak Ageng	114,515,138	VI	29	Depok	20,572,424	VI
15	Sijeruk	414,329,429	V	30	Blacanan	22,684,189	VI

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2014

Orde tingkat aksesibilitas dihitung dengan aksesibilitas dari kedua kecamatan. Hasil yang aturan *Sturgess* dengan menggunakan data nilai diperoleh, tingkat aksesibilitas di Kecamatan

Sragi lebih tinggi jika dibandingkan dengan 3.1 peta orde aksesibilitas Kecamatan Sragi dan Kecamatan Siwalan. Berikut merupakan gambar Siwalan:



**Gambar 3.1** Peta Orde Aksesibilitas Kecamatan Sragi-Kecamatan Siwalan

Tinggi rendahnya tingkat aksesibilitas dikedua wilayah dipengaruhi oleh jumlah penduduk daerah asal, jumlah penduduk daerah tujuan, jarak yang dinyatakan dalam waktu tempuh, dan jumlah fasilitas yang tersedia di wilayah tujuan sebagai ukuran daya tarik. Disisi lain ketersediaan moda transportasi, kondisi infrastruktur jalan, ketersediaan industri dan kondisi geografis medan yang harus ditempuh juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

Ketersediaan fasilitas pelayanan publik Kecamatan Sragi sebagai daerah induk lebih

tinggi jika dibandingkan dengan Kecamatan Siwalan yang merupakan daerah otonom baru. Di Kecamatan Siwalan masih belum tersedia fasilitas SMA dan pasar pasca satu dasawarsa pemekaran.

Pencapaian daya layan fasilitas SMA dan pasar di Kecamatan Siwalan masih kurang. Sedangkan daya layan fasilitas yang lainnya di kedua lokasi penelitian sudah mampu memenuhi kebutuhan penduduknya.

Tingkat aksesibilitas penduduk terhadap pelayanan publik di Kecamatan Sragi lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kecamatan Siwalan. Faktor yang mempengaruhi diantaranya jumlah penduduk, jarak dan waktu tempuh, ketersediaan pelayanan publik, dan jumlah industri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asril, Sabrina. 2012. 'Mendagri: 70 Persen Pemekaran Daerah Gagal'. Dalam Kompas. 15 Desember.
- BPS Kabupaten Pekalongan. 2006. *Kecamatan Sragi Dalam Angka 2006*.Pekalongan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan.
- BPS Kabupaten Pekalongan. 2012. *Kecamatan Sragi Dalam Angka 2012*. Pekalongan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan.
- BPS Kabupaten Pekalongan. 2006. *Kecamatan Siwalan Dalam Angka 2006*. Pekalongan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan.
- BPS Kabupaten Pekalongan. 2012. *Kecamatan Siwalan Dalam Angka 2012*.Pekalongan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan.
- Investor Daily Indonesia. 2013. *Pemekaran Daerah Lebih Didasari Kepentingan Elite*. 8 Mei.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nuraini, Siti. 2011. 'Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah di Kabupaten Bekasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Studi Kasus Kecamatan Tarumajaya'. Dalam *Kybernan Vol. 2* .No. 2. Hal: 13-20.
- Peraturan Pemerintah No.129 Tahun 2000 tentang *Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran dan Pembentukan dan Penggabungan Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No.13 Tahun 2001 tentang *Pembentukan kecamatan Karangdadap, kecamatan Siwalan, dan kecamatan Wonokerto*.